

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur geografis suatu negara dapat memberikan pengaruh terhadap kepentingan suatu negara, kebijakan luar negeri, hingga hubungan diplomatik dengan negara lain. Geopolitik pun bukan menjadi suatu fenomena baru dalam politik internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dan dikelilingi oleh perairan maritim yang luas dapat menjadi peluang dan juga tantangan. Letak Indonesia yang strategis ini kerap kali dijadikan jalur perdagangan hingga jalur keamanan laut internasional. Dengan situasi ini Indonesia amat bergantung dan memiliki kelebihan dalam bidang kelautan. Namun dibalik peluang dan keunggulannya tidak luput dari hadirnya ancaman kejahatan transnasional yang melewati perairan Indonesia. Melihat peluang dan tantangan ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya kepala negara sangat mempengaruhi kepentingan geopolitik negaranya.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mulai mencetuskan doktrin Poros Maritim Dunia pada 13 November 2014 dalam KTT Asia Timur di Nay, Pyi Taw, Myanmar. Dalam KTT Asia Timur, Joko Widodo menyampaikan bahwa doktrin tersebut merupakan sebagai bentuk peningkatan pembangunan infrastruktur laut hingga penerapan dari diplomasi maritim. Interpretasi Joko Widodo akan geopolitik dan geostrategi Indonesia tertuang dengan baik melalui doktrin Poros Maritim Dunia. Dari doktrin ini menunjukkan adanya ambisi ekspansi dalam

pertahanan luar negeri. Melihat bahwa maritim merupakan wajah dari Indonesia dapat dikatakan bahwa wilayah maritim menjadi bagian yang vital bagi kekuatan nasional dan pusat dari interaksi keamanan internasional. Ekspansi yang dilakukan bukan hanya dalam kawasan ASEAN melainkan kawasan Indo-Pasifik. Dengan ekspansi ini menjadi suatu perwujudan bahwa diperlukannya keterlibatan akan kerja sama dengan negara tetangga dalam menjaga wilayah perairan demi kepentingan bersama. Konflik yang kerap kali berkenaan dengan keamanan maritim tentu akan menjadi ancaman bersama. Dengan demikian doktrin ini membuktikan bahwa kawasan Indo-Pasifik telah bermetamorfosis menjadi kawasan penting dalam ranah politik internasional.¹

Ekspansi yang dilakukan oleh Indonesia ke kawasan Indo-Pasifik secara langsung akan berkaitan dengan Australia sebagai negara tetangga. Australia sendiri pun melihat bahwa kawasan Indo-Pasifik sebagai strategi utama dalam pertahanan dan ekonomi Australia dalam dekade terakhir. Gagasan akan Indo-Pasifik pun beralih menjadi suatu bentuk geopolitik.² Dalam perihal kebijakan luar negerinya tertuang dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 bersama dengan Buku Putih Pertahanan 2016 yang memusatkan pembangunan melalui "*foundations for success*" yang berarti kemampuan domestik, diplomatik, dan pertahanan nasional yang kuat serta penyediaan bantuan luar negeri untuk

¹ M. Najeri Al Syahrin, "Kebijakan Poros Maritim Jokowi Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan Keamanan Laut Indonesia", *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (2018): 2.

² David Scott, "Australia's Embrace Of The 'Indo-Pacific': New Term, New Region, New Strategy?", *International Relations of the Asia-Pacific* 13, no. 3 (2013): 425-448, diakses 20 September 2021, <https://theasiadialogue.com/wp-content/uploads/2018/01/australia-indo-pacific.pdf>.

memastikan dunia yang stabil dan makmur. Dari konsep ini menjadi sebuah kerangka peluang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera dimana hak semua negara dihormati.³

Demi memperkuat eksistensi, pengaruh, dan kepentingannya diperlukan adanya kerja sama dengan negara dikawasan. Australia terbuka bermitra dengan negara kawasan Indo-Pasifik dalam hubungan kerja sama. Hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Australia sendiri mengalami pasang surut. Walaupun demikian kedua negara tersebut saling membutuhkan demi kepentingannya satu sama lain. Kepentingan akan keamanan wilayah maritim Australia menjadi prioritas dikarenakan mempengaruhi stabilitas keamanan. Indonesia dengan kekuatan maritimnya dinilai dapat menjadi penahan apabila terdapat serangan yang mengancam stabilitas kawasan.⁴ Australia pun menyadari dengan melihat posisi Indonesia yang strategis menjadi bukti bahwa Indonesia dapat menjadi pemimpin tidak hanya bagi ASEAN namun pemimpin bagi kawasan Indo-Pasifik.

Dalam hal ini Indonesia menjadi salah satu negara yang tergabung dalam Indo-Pasifik Partnership bersama Australia. Kerja sama ini sebagai bentuk adanya upaya dalam mempererat hubungan diplomatik terutama dalam bidang keamanan yang turut merepresentasikan kepentingan bersama. Menyadari bahwa Australia

³ Jane M Hardy, "Australia'S Role In The Indo-Pacific | Indo-Pacific Defense Forum", *Indo-Pacific Defense Forum*, last modified 2019, diakses 20 September 2021 <https://ipdefenseforum.com/2019/11/australias-role-in-the-indo-pacific/>.

⁴ Muhammad Imam, "Strategi Australia Memasukkan Indonesia Ke Dalam Buku Putih Pertahanan (Defence White Paper 2013)", *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 9.

negara yang dekat dengan Indonesia, serta Indonesia sendiri memiliki wilayah perbatasan laut yang sangat luas, kedua negara turut menghadapi tantangan yang sama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu Indonesia dan Australia turut memperkuat kerja sama akan kepentingan keamanan maritim.⁵

Dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan di Indonesia dan Australia, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* pada tahun 2005 sebagai awal mula kerja sama. Hingga pada 13 November 2006 kerja sama keamanan dan pertahanan semakin kokoh dengan lahirnya Traktat Lombok. Traktat Lombok merupakan perjanjian yang berisikan kerangka kerja dalam mengendalikan tantangan yang dihadapi dalam keamanan tradisional dan non-tradisional. Penguatan komitmen kerja sama yang dilakukan mencakup bidang pertahanan, penegakan hukum, terorisme hingga keamanan maritim. Melalui perjanjian ini kedua negara dapat terus melakukan dialog bilateral hingga pertukaran informasi secara kooperatif.⁶

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama Menteri Luar Negeri menandatangani *Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation* di Sydney pada 26 Februari 2017. Prinsip akan deklarasi ini terkandung dalam *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* pada 2005, dan Traktat Lombok. Dalam

⁵ Department of Foreign Affairs and Trade, Foreign Policy White Paper 2017 (Australia: Australian Government, 2017), diakses 20 September 2021, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific/indo-pacific.html>.

⁶ "Lombok Treaty, 2006 — 70 Years Indonesia-Australia", *70 Years Indonesia-Australia*, last modified 2021, diakses 20 September 2021, <https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/kerja-sama-antara-australia-dan-indonesia/lombok-treaty-2006>.

deklarasi ini Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperdalam dan memperluas kerja sama maritim. Deklarasi tersebut dibuat dengan melihat bahwa pentingnya perdagangan maritim dan ekonomi biru bagi keuntungan kolektif, kepentingan bersama dalam mengembangkan konektivitas maritim, dan kekuatan akan kerja sama maritim yang sedang berlangsung.⁷ Dari pertemuan tersebut dikeluarkannya Plan of Action pada 16 Maret 2018 di Sydney. Plan of Action merupakan pendukung jalannya implementasi dari deklarasi tersebut yang diimplementasikan dalam kurun waktu 2018-2022. Dalam Plan of Action berisikan poin-poin fokus yang membahas mengenai meningkatkan ekonomi biru, meningkatkan konektivitas serta keamanan maritim, memberantas kejahatan transnasional yang melalui jalur laut, hingga memberantas penangkapan ikan secara ilegal dan segala kejahatan dalam sektor perikanan.⁸

Pentingnya perairan maritim terlihat dari ambisi Indonesia yang tertuang dalam doktrin Poros Maritim Dunia guna meningkatkan potensi dari kekuatan maritim dari sektor ekonomi dan pertahanan. Baik di wilayah Indonesia maupun Australia memperlihatkan bahwa diperlukannya kerja sama komprehensif yang terjalin di antara dua negara. Dengan disetujuinya Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation menjadi cerminan dari kedua negara masih

⁷ Department of Foreign Affairs and Trade, *Joint Declaration On Maritime Cooperation Between The Government Of Australia And The Government Of The Republic Of Indonesia* (Sydney: Australian Government, 2017), diakses 20 September 2021, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-indonesia-joint-declaration-maritime-cooperation.pdf>.

⁸ Kementerian Luar Negeri RI, *Plan of Action For The Implementation Joint Declaration On Maritime Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia* (Sydney: Kementerian Luar Negeri RI, 2018), diakses 21 September 2021, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0238.pdf>.

saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan kepentingannya. Disamping itu kerja sama yang terjalin merupakan upaya untuk menyelesaikan tantangan yang dirasakan oleh masing-masing negara dalam bidang maritim. Berdasarkan penjabaran tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam kerja sama Indonesia dengan Australia dalam perspektif keamanan maritim pada tahun 2014-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya serta topik yang ingin dibahas dalam penelitian, maka penulis dapat menentukan sebuah rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia—Australia dalam bidang maritim pada tahun 2014-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendapat gambaran mengenai bentuk kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang maritim sepanjang tahun 2014-2020
2. Menganalisis implementasi dari kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara, termasuk peluang dan tantangan kedepan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Memberi referensi guna menambah pemahaman dan wawasan bagi pembaca mengenai kerja sama dan bentuk implementasi kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I: Pada bagian pendahuluan, penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang dari munculnya kerja sama Indonesia dan Australia dalam konteks keamanan maritim. Selain itu penulis pun menentukan pertanyaan dari rumusan masalah, serta memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

Bab II: Pada bagian ini, penulis akan menyusun kerangka penelitian guna membantu penelitian sehingga penelitian ini memiliki fokus yang jelas. Dalam kerangka berpikir ini terdiri tinjauan pustaka yang memaparkan kajian-kajian dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik guna mendukung penelitian, serta kajian teori dan konsep yang relevan bagi penelitian guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta pembahasan dalam bab empat.

Bab III: Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam menyempurnakan penelitian ini. Penjabaran secara sistematis yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian, serta menjabarkan analisis data yang akan digunakan.

Bab IV: Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan mengenai kerja sama keamanan maritim Indonesia dan Australia, dan kepentingan dari Indonesia dan Australia dalam bidang maritim. Kemudian penulis pun akan memaparkan analisis

implementasi, serta peluang dan tantangan dari kerja sama Indonesia dan Australia dalam perspektif keamanan maritim pada tahun 2014-2020.

Bab V: Pada bagian kesimpulan, penulis akan memaparkan kesimpulan berupa interpretasi dari keseluruhan penelitian. Penulis juga akan menjabarkan saran dan pendapat mengenai kerja sama Indonesia–Australia dalam bidang maritim.

